



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

**RENCANA STRAGIS
BADAN KESBANG LINMAS
TAHUN 2016-2021**



**BADAN KESBANG LINMAS
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuknya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kestuan Bangsa untuk mendukung Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan dapat diselesaikan rencana Strategis ini disusun untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kestuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam penysunan kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam kurun waktu tahun 2016-2021;

Atas dasar dimaksud diatas, kami telah membuat langkah-langkah kegiatan dengan menyusun Renstra Badan Kestuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk disesuaikan dengan Pedoman yang berlaku.

Kiranya Renstra ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dobo, 27 Oktober 2016

Kepala Badan

JOHN.F.H.TABELA, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19641024 198603 1 024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2016 – 2021. Renstra SKPD merupakan Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mutlak memerlukan acuan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam Rangka Melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kepulauan Aru menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPDB, maka Dokumen Renstra SKPD sangat di perlukan untuk memudahkan penganggaran lima (5) tahunan daerah. Untuk itu, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka Fungsi, Urusan Wajib, Urusan Pilihan Pemerintah Daerah dalam menganalisis isu Strategis, Merumuskan Strategis, Kebijakan, dan menetapkan Prioritas Programnya, setiap Program perlu mempunyai tolak ukur dan target kinerja Capaian Program.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra KESBANG 2016-2021 juga mengacu pada:

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 4286);
2. Undang-undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten seram Bagian Barat, dan kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 155, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 4350);
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, tambahan Negara Republik Indonesia No 4421);
4. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 4474);
5. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 4438);

6. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No 42 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No 03 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten kepulauan Aru Tahun 2016-2020.
12. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No B/1186/M.PAN/04/2008 tentang kebijakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008;
13. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kesbang Linmas

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud: Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Tahunan badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.

Dengan Tujuan yaitu:

1. Memberikan arah Kebijakan Perencanaan serta Prioritas Pembangunan Infrastruktur Wilayah pada Tahun anggaran 2016-2021;
2. Sebagai Instrumen dalam mengukur Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Kepulauan aru sebagai institusi/Lembaga Teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

1.4 Sistem Matika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra KESBANG Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut;

1. Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, Sistematika Dokumen Renstra.

2. Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KESBANG

Bab ini menjelaskan Perkembangan Pembangunan Sektor/Bidang, capaian Kinerja Pelayanan, Capaian Kinerja Keuangan, tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Badan Kesbang

3. Bab III TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KESBANG

Bab ini memuat informasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Badan Kesbang.

4. Bab IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Bab ini memuat Identifikasi dan analisa Lingkungan Strategis, yaitu Identifikasi dan analisa lingkungan Internal KESBANGLINMAS merupakan kelemahan dan kekuatan, serta Identifikasi dan analisa Lingkungan Eksternal KESBANGLINMAS merupakan peluang dan tantangan.

5. Bab V TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab Ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Kebijakan yang akan di tempu oleh KESBANG Tahun 2016-2021.

6. Bab VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif

7. PENUTUP

Bab ini memuat catatan dan harapan kepala Badan Kesatuan Bangsa tentang pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGLINMAS

2.1. Perkembangan Pembangunan Sektor / Bidang

Dalam pelaksanaannya Badan Kesbanglinmas melihat pada kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana, sehingga sangat diperlukannya tenaga aparatur yang profesional untuk menjalankan tugas dimaksud, tapi dalam kenyataannya perlu juga peran serta dari instansi terkait yang ada koordinasi keluar dalam pembinaan pelaksanaan tugas dalam porsi pengamanan dan ketertiban masyarakat serta tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republic Indonesia.

2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Kesbang Linmas.

- Pembinaan Ormas di Kabupaten Kepulauan Aru Sangatlah Penting Untuk di lakukannya Pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat.
- Pembinaan dan Pelatihan Bagi anggota Perlindungan masyarakat setiap kecamatan untuk menjaga keamanan bagi setiap lingkungannya, untuk itu perlunya diadakan pembinaan bagi anggota linmas.
- Tujuan Sosialisasi Kebangsaan adalah untuk menyadarkan masyarakat atau warga negara akan pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan hak kewajiban di depan hukum, serta sebagai pembentukan cara pandang yang sehat dan wajar masa depan bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera. Adapun sosialisasi wawasan kebangsaan di kabupaten kepulauan aru ini mempunyai tujuan yang sama untuk melindungi segenap masyarakat mempersatukan perbedaan – perbedaan yang timbul di masyarakat.
- Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, ratusan Bahasa, dan berbeda adat istiadat yang tidak terhitung jumlahnya. Secara teori keragaman budaya merupakan potensi yang dapat memperkokoh persatuan nasional. Dalam raktek terlebih pada masa reformasi sangat didorong oleh semangat mencari jati diri, keragaman budaya akan menjadi khasanah yang berharga dalam memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa, di Kabupaten Kepulauan Aru kita mempunyai 19 (etnis) yang mana di dalamnya dan bagaimana cara pandang kita untuk bisa menjaga nilai – nilai budaya setiap etnis yang berkembang di Kabupaten ini.
- Untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara untuk pelaksanaan pemilu dimaksud. Seperti terlihat pada Table 10.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Tahun 2009 Tentang Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antara lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 2) Menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsa, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 4) Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsa, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 5) Memimpin penyelenggara administrasi umum, administrasi kepegawaian dan admistrasi keuangan;
- 6) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsa, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 7) Melaksanakan evluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsa, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

2. Sekretaris :

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ketatausahaan;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang ketatausahaan;
- 3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggara kegiatan ketatausahaan;
- 4) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan badan;
- 5) Memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan kerja dilingkungan badan;
- 6) Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan dan urusan rumah tangga lainnya;

- 7) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengadministrasian keuangan;
- 8) Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai;
- 9) Melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian;
- 10) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta penyelenggaraan pelayanan umum;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan ketatausahaan;
- 12) Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- 13) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub Bagian Umum

- 1) Menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, kersipan dan dokumentasi kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan pemberian layanan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan inspektorat;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian program kerja pengawasan;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penghimpunan dan penyiapan Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 7) Menyiapkan bahan dan data serta pelaksanaan evaluasi / operasional tindak lanjut hasil pemeriksaan;

B. Kepala Sub Bagian Keuangan

- 1) Menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, kersipan dan dokumentasi kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan pemberian layanan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan inspektorat;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian program kerja pengawasan;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penghimpunan dan penyiapan Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 7) Menyiapkan bahan dan data serta pelaksanaan evaluasi / operasional tindak lanjut hasil pemeriksaan;

C. Kepala Sub Bagian Perencanaan

- 1) Merencanakan operasional kegiatan, mengatur mengelola urusan kerumahtanggaan;
- 2) Merencanakan dan menghimpun bahan – bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- 3) Melaporkan hasil melaksanakan tugas secara berkala maupun sewaktu- waktu kepada kepala dinas

- 4) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan pengumpulan data potensi yang terkait Dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Social, Budaya;
- 5) Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah Dibidang Pengembangan Kesatuan Bangsa;
- 6) Menyelenggarakan ideologi Pancasila dalam rangka memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;
- 7) Merumuskan upaya pengamanan Ideology, Politik, Ekonomi, Social, Dan Budaya;
- 8) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan wawasan Kebangsaan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

A. Sub Bagian Ketahanan Bangsa

- 1) Menyiapkan data dan bahan penyusunan rencana kerja tahunan sub bagian Ketahanan Bangsa
- 2) Mengumpulkan data dan bahan pembinaan operasional dan fasilitas di bidang Ketahanan Bangsa
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang Ketahanan Bangsa
- 4) Menghimpun bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan Bidang Ketahanan Bangsa
- 5) Menghimpun, menganalisa permasalahan pelaksanaan penyelenggara tugas Bidang Ketahanan Bangsa
- 6) Melaporkan, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Wawasan Kebangsaan

- 1) Menyiapkan data dan bahan penyusunan rencana kerja tahunan sub bagian Ketahanan Bangsa
- 2) Mengumpulkan data dan bahan pembinaan operasional dan fasilitas di bidang Ketahanan Bangsa
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang Ketahanan Bangsa
- 4) Menghimpun bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan Bidang Ketahanan Bangsa

- 5) Menghimpun, menganalisa permasalahan pelaksanaan penyelenggara tugas Bidang Ketahanan Bangsa
- 6) Melaporkan, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga :

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan porsenil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan pendataan dan penyusuna informasi kelembagaan Partai Politik, Organisasi Massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- 5) Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah Dibidang Pengembangan Kesatuan Bangsa;
- 6) Menyelenggarakan ideologi Pancasila dalam rangka memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;
- 7) Merumuskan upaya pengamanan Ideology, Politik, Ekonomi, Social, Dan Budaya;
- 8) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan wawasan Kebangsaan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

A. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif

- 1) Menyiapkan data dan bahan penyusunan rencana kerja tahunan Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
- 2) Mengumpulkan data dan bahan pembinaan operasional dan fasilitas di Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
- 4) Menghimpun bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
- 5) Menghimpun, menganalisa permasalahan pelaksanaan penyelenggara tugas Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
- 6) Melaporkan, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Menginventarisir semua Organisasi Masyarakat, Partai politik dan Lembaga swadaya masyarakat terkait dengan administrasi
- 2) Menyiapkan data dan bahan penyusunan rencana kerja tahunan Sub Bagian Organisasi Masyarakat

- 3) Mengumpulkan data dan bahan pembinaan operasional dan fasilitas di Sub Bagian Organisasi Masyarakat
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan Sub Bagian di bagian Organisasi Masyarakat
- 5) Menghimpun bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sub Organisasi Masyarakat
- 6) Menghimpun, menganalisa permasalahan pelaksanaan penyelenggara tugas Sub Bagian Organisasi Masyarakat
- 7) Melaporkan, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat:

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antara lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antara lembaga, pemberdaya potensi dan satuan perlindungan serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 4) Melaksanakan fasilitas pelaksanaan pengembangan dan pembinaan organisasi perlindungan masyarakat;
- 5) Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan tugas anggota satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Merumuskan pedoman dan mekanisme koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 7) Melaksanakan pendataan, pengkajian serta pemantauan terhadap daerah rawan bencana;
- 8) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan dalam rangka usaha pencegahan, kesiagaan dan penanggulangan bencana;
- 9) Melaksanakan pengarahan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana
- 10) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana, penanganan korban bencana serta rehabilitasi akibat bencana
- 11) Melaksanakan pengelolaan tempat-tempat pengusian;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdaya potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya

- 1) Menyiapkan data dan bahan penyusunan rencana kerja tahunan Sub bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya
- 2) Mengumpulkan data dan bahan pembinaan Operasional dan fasilitas di bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di di bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya
- 4) Menghimpun bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan di bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya
- 5) Menghimpun dan Menganalisa Permasalahan pelaksanaan penyelenggaraan tugas di di bagian Mitigasi dan Pengamanan Sumber Daya
- 6) Melaporkan dan Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Relokasi, Rekontruksi dan Rehabilitasi

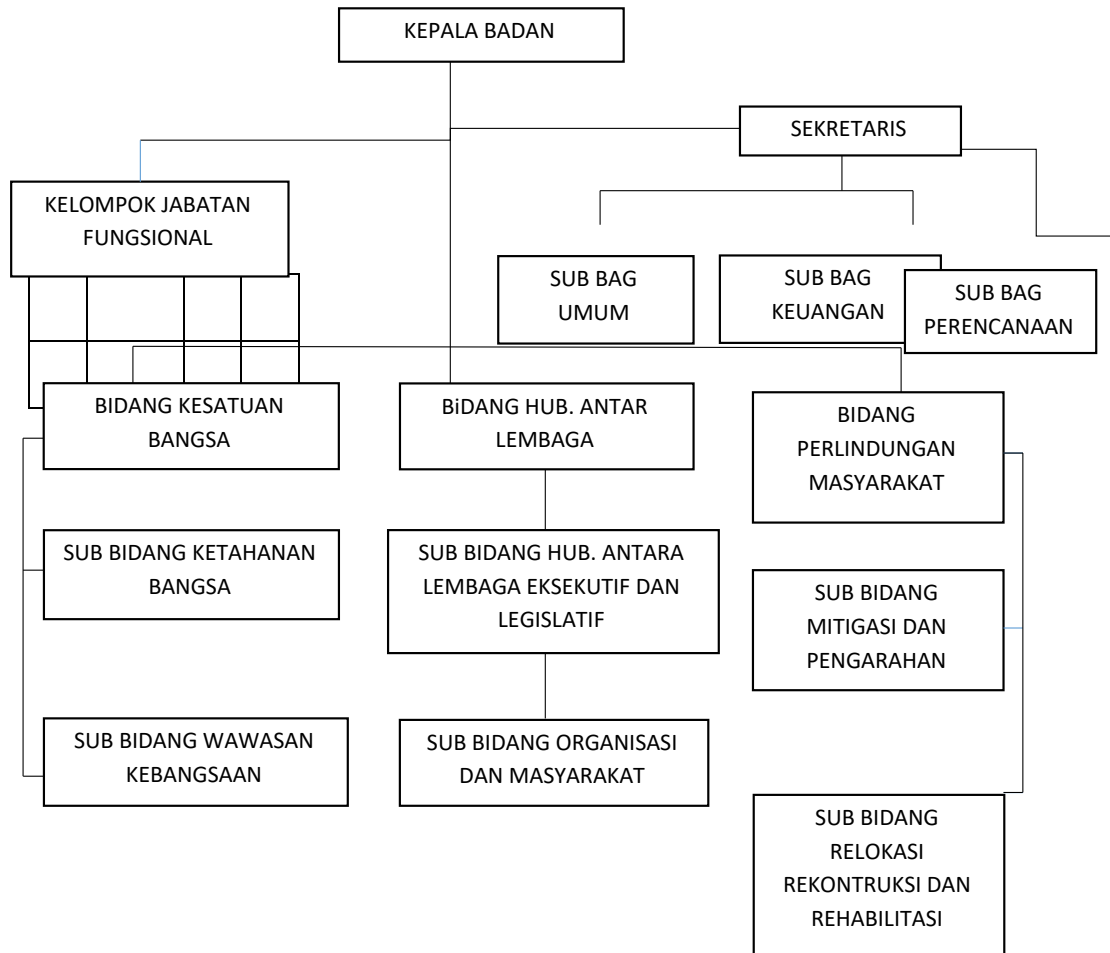
- 1) Menyusun Program kerja sub Bagian Relokasi, Rekontruksi dan rehabilitasi untuk diajukan kepada Kepala Badan
- 2) Menginventarisir/mendata Penduduk (Masyarakat) korban Bencana yang akan di relokasi dan yang akan mendapat pekerjaan Rekontruksi dan rehabilitasi terhadap akibat dari suatu bencana
- 3) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk pekerjaan Rekontruksi dan rehabilitasi terhadap akibat dari bencana yang dialami penduduk
- 4) Membagi dan Memberikan petunjuk pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan tugas bawahan
- 5) Melaporkan dan Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan melakukan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

3.1 Susunan Struktur Orgaisasi SKPD

- 1) Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekertaris Badan
 - a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan
- 3) Bidang Kesatuan Bangsa
 - a) Sub Bidang Ketahanan Bangsa
 - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- 4) Bidang Antar Lembaga
 - a) Hubungan Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif
 - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a) Sub Bidang Mitigasi Dan Pengarahan Sumber Daya
 - b) Sub Bidang Relokasi Dan Rehabilitas

3.2 Struktur Organisasi Badan Kesbang Linmas

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat



Susunan Kepegawaian Badan Kesbang Linmas

Adapun tingkat pendidikan formal yang ditikuti oleh pegawai di lingkup Badan Kesbanglinamas Dari 28 orang terdapat 7 orang diantaranya berpendidikan Sarjana (S1), sedangkan 20 orang berpendidikan SLTA / sederajat dan 1 orang berpendidikan SMP/Sederajat. Hal ini terlihat pada table 1.

Tabel 1 Tingkat pendidikan Formal untuk Pegawai pada Badan Kesbanglinmas,

Srata Satu (S1)	:	7	Orang
Diploma Tiga (D3)	:	-	Orang
SLTA/ Sederajat	:	20	Orang
SLTP/ Sederajat	:	1	Orang
SD/ Sederajat	:	-	Orang
Jumlah	:	28	Orang

Adapun golongan kepangkatan pegawai yang ada dilingkup Badan Kesbang Linmas, Pembina Utama Muda IV/b 00 orang, Pembina IV/a 1 orang, Penata Tk I/III 1 orang, Penata III/c 1 orang, Penata Muda III/a 2 orang, Pengatur Tk I/II d 1 orang, Pengatur Muda Tk I/II b 1 orang, Pengatur Muda II a 19 orang, Juru I/c 2 orang. Hal ini terlihat pada table. 2.

Table 2 Golongan/Kepangkatan Pegawai pada Badan Kesbang

Pembina Tk.I IV / b	:	1	Orang
Penata Tk. I / III d	:	3	Orang
Penata III d	:	1	Orang
Penata / III c	:	2	Orang
Penata Muda Tk.I / III b	:	1	Orang
Penata Muda Tk.I / III a	:	1	Orang
Pengatur / II c	:	8	Orang
Pengatur / II b	:	10	Orang
Juru Muda Tk. I / I d	:	1	Orang
Total Pegawai	:	28	Orang

Adapun tingkat Pendidikan Pegawai pada Badan Kesbanglinmas berdasarkan disiplin Ilmu adalah Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Sosial 2 orang, Ilmu Ekonomi 2 orang, Ilmu Pertanian 1 Orang Ilmu Umum 20 orang,. Hal Ini dapat dilihat pada table. 3

Table 3 Jurusan Dalam Pendidikan Formal Untuk Pegawai Pada Badan Kesbang

Ilmu Hukum	:	2	Orang
Ilmu Sosial	:	2	Orang
Ilmu Ekonomi	:	2	Orang
Ilmu Pertanian	:	1	Orang
Ilmu Umum	:	24	Orang
Jumlah	:	27	Orang

Adapun Pegawai yang sudah mengikuti Jenjang Pendidikan Dan Pelatihan Structural yaitu, SPAMEN/PIM II 1 orang, SPAMA/PIM III 2 orang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Table 4 Pendidikan Dan Pelatihan Structural Pegawai Pada Badan Kesbang

SPAMEN/PIM III	:	3	Orang
SPAMA/PIM IV	:	2	Orang
ADUM/ADUMLA/PIM IV	:	1	Orang
Jumlah	:	6	Orang

3.3 Sumber Daya Badan Kesbang

Aset yang dikelola oleh badan Kesbang Linmas, dapat terlihat pada tabel berikut :

Nama Barang /Jenis Barang	Merek / Model	Tahun Pembelian	Jumlah Barang Register	Keadaan Barang	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
Leptop	Lenovo	2011	'0001-0002		Rusak

Sepeda Motor	Yamaha Mio	2012	'0001	Baik	
Camera Digital	Sony	2012	'0001-0002	Baik	Rusak
Handy Cam	Sony	2012	'0001-0002		Rusak
Komputer	Aser	2012	'0001-0004		Rusak
Printer	Canon	2012	'0001-0004		Rusak
Meja Esalon III	Saga	2013	'0001-0004	Baik	
Kursi Esalon III	Indachi	2013	'0001-004	Baik	
Kursi Esalon IV	Ferona	2013	'0001-0003	Baik	
Sepeda Motor	Yamaha Mio/Yupiter	2014	'0001-0002	Baik	
Ac	LQ / Sharp	2014	'0001-0002	Baik	
Finger Print	Solution X 100c	2014	'0001	Baik	
Komputer Pc	Lq	2014	'0001-0002	Baik	
Leptop	Thosiba	2014	'0001	Baik	
Printer Gaji	Epson Lq	2014	'0001	Baik	
Kabel Utp	-	2014	'0001	-	

Connector	-	2014	'0001	-	
Hub. Kapasitas 8 Port	-	2014	'0001	-	
Access Point	-	2014	'0001	-	
Mesin Speed Boat	Yamaha	2014	'0001	Baik	
Lemari Arsip	Expo Furniture/MTB-3182 N	2015	'0001-0003	Baik	
Lemari Kaca	Expo Furniture/MTB-3182 N	2015	'0001-0002	Baik	
Leptop	Aser	2015	'0001-0002	Baik	
Kursi Kerja	Chitose/Haa	2015	'0001-0015	Baik	
Kursi Rapat	Chitose/Haa	2015	'0001-0020	Baik	
Mesin Potong Rumput	Katana / 2 cycle, single cylindes, forced air-cooled casoline angine	2015	'0001	Baik	
Sepda Motor	Yamaha /New Mio Blue Core (SE 88)	2015	'0001-002	Baik	

BAB IV

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbang

Pelaksanaan analisa lingkungan strategi merupakan bagian dari komponen perencanaan strategi dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi yang saling menguntungkan lingkup analisa lingkungan strategi yang meliputi Analisa Lingkungan Internal di Lingkungan Eksternal.

4.1 Analisis Lingkungan Internal

4.1.1. Identifikasi Kekuatan Badan Kesatuan Bangsa

1. Komitmen dan pemahaman pejabat cukup tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi
2. Adanya koordinasi antar pegawai
3. Adanya pelimpahan wewenang dari atasan kebidang-bidang berdasarkan tupoksi.
4. Adanya Motivasi pegawai dalam meningkatkan Kinerja

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Komitmen dan pemahaman pejabat cukup tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi	25	4	1,00
2	Adanya Koordinasi antar Pegawai	15	3	0,45
3	Adanya Pelimpahan wewenang dari atasan kebidang-bidang berdasarkan TUPOKSI	35	4	1,45
4	Adanya Motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja	25	4	1,00
	TOTAL	100		3,90

4.1.2. Identifikasi Kelemahan Badan Kesatuan Bangsa

1. Kurangnya jumlah pegawai memenuhi struktur organisasi yang ada;
2. Kurangnya sumber Daya aparatur yang professional;
3. Rendahnya tingkat pemahaman pegawai tentang tupoksi;
4. Kurangnya sarana dan prasaran
5. Rendahnya disiplin pegawai.

NO	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Kurangnya Jumlah Pegawai memenuhi Struktur Organisasi yang ada	25	4	1,00
2	Kurangnya sumber Daya Aparatur yang professional	25	4	1,00
3	Rendahnya tingkat pemahaman pegawai tentang tupoksi	15	4	0,60
4	Kurangnya sarana dan prasarana	20	4	0,80
5	Rendahnya disiplin pegawai	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,80

4.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

4.2.1. Identifikasi Peluang Badan Kesatuan Bangsa

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Badan Kesbang dalam tupoksinya
2. Besarnya Sumber Daya Alam yang tersedia untuk di awasi
3. Adanya Kerjasama antara pemerintah, Orosopol, dan Ormas/LSM terhadap pembangunan
4. Adanya penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.

NO	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang mendukung Badan Kesbang dalam TUPOKSInya	30	5	1,50
2	Besarnya Sumber Daya Alam yang tersedia untuk di awasi	20	4	0,80
3	Adanya Kerjasama antara pemerintah, Orsopol, dan Ormas/LSM terhadap pembangunan	30	5	1,50
4	Adanya Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Badan KesbangL ditingkat provinsi maupun pusat	20	4	0,80
	TOTAL	100		4,60

4.2.1. Identifikasi Ancaman Badan Kesatuan Bangsa

1. Letaknya geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang mengakibatkan lemahnya daya jangkau pihak keamanan dalam pemantauan situasi dan kondisi masyarakat kabupaten;
2. Kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan, serta peraturan undang – undang yang berkaitan dengan keamanan lingkungan;
3. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan terbaru ayng berkaitan dengan lingkungan

NO	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Letaknya Geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang mengakibatkan lemahnya daya jangkau	25	4	1,00

	pihak keamanan dalam pemantauan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten			
2	Kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan, serta peraturan undang-undang yang berkaitan dengan keamanan lingkungan	25	4	1,00
3	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan lingkungan	25	4	1,00
4	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang pelayanan Badan Kesatuan Bangsa	25	4	1,00
	Total	100		4,00

MATRIKS POSISI SEKARANG

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
KEKUATAN	3,90	PELUANG	4,60
KELEMAHAN	3,80	ANCAMAN	4,00
KESEIMBANGAN	0,10	KESEIMBANGAN	0,6

RELEVANSI MISI

MISI RPJMD

SKPD

- | | | |
|-----|---|---------------|
| (1) | Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani; | Badan Kesbang |
| (2) | Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal; | Badan Kesbang |

PRIORITAS BADAN KESATUAN BANGSA

1. Bersatu, berdaulat sejahtera persfiek kedepan pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum serta sebagai pembentukan cara pandang yang sehat dan wajar dalam kerangka NKRI
2. Mewujudkan kondisi masyarakat harus harus diorientasikan kemasa depan dan dinamikanya diarahkan pencapaian kehidupan yang baik.
3. Mewujudkan pemahaman dan keamanan masyarakat terhadap tujuan negara kesatuan Republik Indonesia
4. Mewujudkan lingkungan aman, tenang melalui pembinaan yang optimal dalam rangka kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan menaati segala peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ANALISIS STRATEGI PILIHAN

Pada dasarnya strategi dalam kegiatan, mekanisme, atau sistim untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan melamarkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan nasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*Strength- S*) dengan peluang (*Opportunity- O*) yang dikenal dengan strategi S-O, memadukan kelemahan (*Weakness- W*) dengan peluang (*Opportunity- O*) yang dikenal dengan strategi W-O dan memadukan kekuatan (*Strength- S*) dengan ancaman (*Threat- T*) yang dikenal dengan strategi S-T. Strategi S-O dimaksud sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk mencapai atau merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksud dengan upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada. Sedangkan strategi S-T dimaksud sebagai upaya untuk memaskilmakan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan cara demikian akan diperoleh strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, peluang. Masing-masing

strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal telah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam memanfaatkan sumberdaya di Badan Kesbanglinmas Kabupaten Kepulauan Aru serta memiliki peluang dan ancaman yang berasal dari luar, sehingga dibawah ini akan dianalisis keterkaitan antara lingkungan internal dan eksternal.

Strategi antara kekuatan dan peluang (S-O)

1. Komitmen dan pemahaman pejabat cukup tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi berpeluang terhadap Besarnya Sumber Daya Alam yang tersedia untuk dikelola, dan terselenggaranya kerjasama antar pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Bidang Kesbanglinmas ditingkat Provinsi maupun tingkat Pusat;
2. Adanya koordinasi antar pegawai juga pelimpahan wewenang dari atasan kebidang- bidang berdasarkan tupoksi berpeluang terhadap kerjasama antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.

Strategi antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

1. Peningkatan jumlah pegawai untuk memenuhi struktur organisasi yang ada, dan peningkatan pemahaman pegawai tentang tupoksi serta disiplin pegawai dapat berpeluang terhadap peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.
2. Peningkatan sumberdaya apratur yang professional serta menambah saran dan prasarana dapat mengelola sumberdaya alam yang tersedia, selain itu terlaksananya antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.

Strategi antara Kekuatan dan Ancamann (S-T)

Adanya Komitmen dan pemahaman pejabat cukup tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi, koordinasi antar pegawai juga pelimpahan wewenang dari atasan kebidang- bidang dapat mengatasi ancaman terhadap Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang mengakibatkan lemahnya daya jangkau pihak keamanan dalam situasi dan kondisi masyarakat kabupaten, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan serta kuarngnya sosialisasi perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.

	<p>Kesbanglinmas ditingkat Provinsi maupun tingkat Pusat;</p> <p>2. Adanya koordinasi antar pegawai juga pelimpahan wewenang dari atasan kebidang-bidang berdasarkan tupoksi berpeluang terhadap kerjasama antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.</p>	<p>menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan serta kuarngnya sosialisasi perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.</p>
<p>Kelemahan :</p> <p>Kurangnya jumlah pegawai memenuhi struktur organisasi yang ada;</p> <p>Kurangnya sumberdaya aparatur yang professional;</p> <p>Rendahnya tingkat pemahaman pegawai tentang tupoksi;</p> <p>Kurangnya sarana dan prasaran</p> <p>Rendahnya disiplin pegawai.</p>	<p>Keterkaitan W – O:</p> <p>1. Peningkatan jumlah pegawai untuk memenuhi struktur organisasi yang ada, dan peningkatan pemahaman pegawai tentang tupoksi serta disiplin pegawai dapat berpeluang terhadap peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.</p> <p>2. Peningkatan sumberdaya apratur yang professional serta menambah sarana dan prasarana dapat mengelola sumberdaya alam yang tersedia, selain itu terlaksananya antara Pemerintah, Orsospol dan Ormas/LSM terhadap pembangunan serta penyelenggara berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Badan kesbanglinmas ditingkat provinsi maupun pusat.</p>	

KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS

Penyusunan rumusan Isu Strategis merupakan tindak lanjut dari Identifikasi terhadap lingkungan linternal dan Eksternal yang selanjutnya dilakukan skoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan perangkaan untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Urgensi : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
- b. Desentralisasi : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan

- c. Kewenangan : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- d. Kemampuan : Kendali-kendali Isu yang muncul dapat dikendalikan pelaksanaannya
- e. Biaya : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
- f. Landasan Legalitas : Isu yang muncul sesuai dengan landasan loyalitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

NO	Kriteria	Bobot
1.	Urgensi: Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan	20
2.	Desentralisasi : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan	10
3.	Kewenangan : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki	20
4.	Kemampuan : Kendali-kendali Isu yang muncul dapat dikendalikan pelaksanaannya	10
5.	Biaya : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada	15
6.	Landasan Legalitas : Isu yang muncul sesuai dengan landasan loyalitas dalam penyelenggaraan pemerintah	25
	TOTAL	100

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANG

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN
Bersatu, berdaulat sejahtera persfektif kedepan pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum serta sebagai pembentukan cara pandang yang sehat dan wajar dalam kerangka NKRI	Terwujudnya rasa kesatuan dalam kehidupan masyarakat untuk mempertahankan keutuhan wilayah kepulauan dalam bentuk terwujudnya rasa persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras daei seluruh aspek kehidupan masyarakat.	Meningkatnya pembinaan rasa bersatu yang didukung oleh rakyat yang berjiwa patriot cinta tanah air serta memiliki kesadaran bela Negara dan bangsanya
Mewujudkan kondisis masyarakat harus harus diorientasikan kemasa depan dan dinamikanya diarahkan pencapaian kehidupan yang baik.	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman melalui peningkatan pembinaan terhadap masyarakat.	Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat.
Mewujudkan pemahaman dan keamanan masyarakat terhadap tujuan negara kesatuan republik Indonesia.	Mewujudkan Pemahaman masyarakat tentang Keamanan demi mewujudkan tujuan Negara Kesatuan	Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat tentang proses pengerat, pengikat (bersifat demokrasi) harus berjalan secara damai tanpa kekerasan secara tertib dan stabil dalam lingkungan masyarakat.
Mewujudkan lingkungan aman, tenang melalui pembinaan yang optimal dalam rangka kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.	Terwujudnya lingkungan yang nyaman dalam masyarakat guna kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kenyamanan lingkungan demi kelancara pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Mewujudkan masyarakat yang tertib dan menaati segala peraturan yang berlaku dalam Negara Kestuan rebublik Indonesia.	Terwujudnya masyarakat yang taat aturan dalam menegahkan kaidah dan norma – norma yang ada dalam masyarakat.	Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang aturan – aturan yang berlaku dan harus ditaati dan ditegakan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa tahun 2016-2021 yang dilaksanakan berdasarkan visi-misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun pembangunan dengan menetapkan skala prioritas pelaksanaan pada tiap tahun anggaran. Pelaksanaan rencana strategis ini digerakan dengan mensinergikan potensi-potensi manajemen yang ada secara sinergik, terencana, terpadu, terkendali serta bertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian sasaran yang diharapkan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa ini dalam skala prioritas tertentu akan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk yang lebih konkrit dan teknis untuk implementasikan dalam rencana kegiatan yang terjadwal dan terarah dalam kurun waktu 1(satu) tahun hingga masa Renstra ini berakhir yaitu tahun 2021.

Dalam melaksanakan rencana dokumen strategis pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa memerlukan dukungan masyarakat setempat, pihak swasta dan stockholder yang ada lebih khusus pemerintah kabupaten sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah pesisir dan kepulauan ini.

Dalam upaya meningkatkan *good governens* dalam lingkup SKPD maka diharapkan akan terciptanya kerjasama yang maksimal dari pihak terkait dalam memberikan standard an indicator yang baik sebagai data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah termasuk dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dalam mengevaluasi tanggungjawab program yang dijalankan.

Sehubungan dengan itu pula diharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi yang berwenang agar dapat menghasilkan sebuah standard an indicator kinerja yang kualitatif serta dapat digunakan secara umum oleh seluruh instansi pelaksana yang adadidaerah Kabupaten Kepulauan Aru sehingga sebuah standard an indikator kinerja tidak ditentukan oleh masing-masing SKPD. Harapan lain yang menjadi catatan terakhir penutup ini ialah hendaknya mekanisme dalam penyusunan dokumen perencanaan didaerah dalam setiap level kedepan dapat dikonsolidasi demikian rupa sehingga tidak terkesan tergesa – gesa yang alhasilnya dapat mengurangi kualitas dokumen.

Dobo, 27 Oktober 2016

Kepala Badan

JOHN.F.H.TABELA, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19641024 198603 1 024